



► PENJUALAN SERAGAM

Disdik: Temuan ORI Menggeneralisasi

Sunartono, Anisatul Umah, & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) soal pengadaan seragam sekolah, dinilai terlalu menggeneralisasi semua sekolah negeri di DIY memperjualbelikan seragam sekolah. Padahal, sudah banyak sekolah yang menyerahkan pengadaan seragam kepada orang tua/wali

murid.

“Ada juga seragam sekolah misalnya topi, dasi, dicap atau disablon dari sekolah, ini pertanyaannya sederhana, memangnya orang tua murid mau *nyablon* sendiri-sendiri,” kata Sekretaris Disdik Sleman, Sri Adi Marsanto, Selasa (27/9).

Menurutnya, jika kesepakatan muncul dari kelompok orang tua, sulit untuk dikontrol. Misalnya

20-30 orang tua sepakat beli seragam bersama, dan mereka sudah paham apakah akan ada keuntungan atau tidak dari beli seragam bersama ini.

“Lalu kalau ada sisa diikhhlaskan bagaimana, memang sulit kalau diinisiasi oleh sekelompok orang tua atau paguyuban. Enggak hanya seragam tetapi juga buku,” ucapnya.

► Halaman 10

Disdik: Temuan...

Menurutnya secara aturan memang sekolah tidak boleh menjual seragam. Namun temuan ORI DIY dia nilai kurang tepat jika menggeneralisasi semua sekolah lantaran temuan itu hanya ada di beberapa sekolah. Sri menyebut tugas sekolah sudah berat, baik kepala sekolah dan guru. Mereka fokus pada kegiatan belajar mengajar untuk mencerdaskan murid-muridnya. Adanya pemberitaan seragam yang sekolah dilakukan semua sekolah tersebut cukup mengganggu.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY juga membantah hasil taksiran ORI DIY terkait dengan akal-akalan penjualan seragam sekolah di Bumi Mataram. Bahkan, Disdikpora DIY menganggap angka Rp10 miliar keuntungan sekolah itu angka yang bombastis.

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, menilai laporan yang dirilis ORI DIY terkait dengan dugaan keuntungan jual beli seragam sekolah mencapai Rp10 miliar tidak sepenuhnya menggunakan data riil dari lapangan. Data itu hanya diambil berdasarkan asumsi temuan satu sekolah kemudian dikalikan jumlah seluruh siswa baru di DIY.

Padahal, kata Didik Wardaya, tidak bisa serta merta disamaratakan seluruh sekolah DIY melakukan pengadaan seragam sekolah. “Atau bisa jadi temuan didapatkan di satu sekolah melalui penjualan seragam oleh forum orang tua. Kemudian dibuat rata-rata seluruh DIY muncul angka Rp10 miliar itu. Terlalu bombastis angkanya. Jadi itu hanya asumsi-asumsi, karena sekolah yang lain belum semua melakukan pengadaan seragam,” katanya, Selasa.

Didik menambahkan berdasarkan pengecekan langsung petugas Disdikpora DIY di lapangan masih banyak pelajar SMA/SMK yang saat ini belum mengenakan seragam sekolah. Hal ini karena memang tidak ada paksaan siswa harus membeli seragam di sekolah. “Saya kemarin ke SMK Pundong dan beberapa SMA di Bantul itu siswanya masih banyak yang menggunakan seragam SMP, mereka masih pakai biru putih, bukan putih abu-abu,” ujarnya.

Menurunkan Semangat

Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta mempertanyakan validitas data yang diungkapkan ORI. “Kalau seperti ini menurut saya tidak profesional dan tidak berorientasi pada penyelesaian masalah. Ini justru akan merugikan

dunia pendidikan DIY. Karena sekolah akan terpojok dan terstigma negatif.”

Dia menyarankan agar ke depan ORI DIY lebih berhati-hati menyampaikan data dengan tidak sekadar mendasarkan pada asumsi dan membuat generalisasi. Ia menyadari praktik jual beli seragam tentu ada secara kasuistik dengan jumlah tertentu. Namun dalam proses penghitungan data, ORI langsung memukul rata semua sekolah.

“Apalagi bisa menyebut sekian puluh miliar itu dari mana dan bagaimana cara menghitungnya. Partisipasi masyarakat atau orang tua berkontribusi itu sudah ada mekanismenya,” katanya.

Huda mengaku khawatir tuduhan ORI DIY tersebut justru akan mendegradasi dan menurunkan semangat sekolah di tengah upaya akselerasi pemahaman mata pelajaran yang sempat tersendat akibat pandemi. Saat ini, sebagian besar sekolah sedang berjuang keras mengatasi keteringgalan akibat pandemi.

Kasus Tahun Lalu

Sementara itu, Kepala SMPN 8 Jogja, Binarsih Sukaryanti, menyebut penjualan seragam sekolah sempat terjadi pada penerimaan murid baru tahun lalu. Saat itu, ia baru dua bulan menjabat dan mendengar informasi soal penjualan seragam dari orang tua murid yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

Ia mengaku langsung mengimbau kepada orang tua murid agar menarik kembali uang yang diserahkan saat pembelian seragam. KPRI diminta menyerahkan uang yang dipungut. “Sebenarnya KPRI ini kan bergerak di bidang di sektor ekonomi, jadi saat ada penerimaan murid baru mereka menawarkan seragam. Tapi statusnya bukan berafiliasi dengan sekolah. Anggota KPRI guru dan PNS, sehingga saya perintahkan setop daripada berisiko,” kata Binarsih.

Ia menyebut praktik jual seragam kemungkinan sudah terjadi sejak kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Persoalan ini memang sulit diuraikan lantaran setiap sekolah punya seragam khas masing-masing, misalnya seragam olahraga. Pembeliannya tentu tidak bisa dilakukan di luar sekolah.

Kepala SMPN 1 Banguntapan, Harjana mengatakan pengadaan seragam di sekolah yang dipimpinnya diserahkan langsung kepada orang tua siswa, bahkan dalam tahun ajaran baru ada siswa yang mengenakan seragam bekas kakak atau saudaranya. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005